

RIHLAH

P-ISSN: 2339-0921

E-ISSN: 2580-5762

Jurnal Sejarah dan Kebudayaan

Article

Kebangkitan Kesultanan Ternate pada Era Reformasi 1998-2002
Rustam Hasyim, Oktosiyanti MT Abdullah, Siti Rahia H. Umar

Kondisi Politik Persia pada Era Dinasti Qajar 1796-1834 M
Arafah Paramasto

Sultan Abdul Qahir dalam Pengembangan Islam di Bima
Rahmat, Nurwahidah

Eksistensi Maccera Manurung dalam Perspektif Nilai Islam
Sitti Fatimah Dwi Putri

Islam dalam Tradisi Pernikahan
Nuraeni

The Developments and Problems of Muslims in Australia
Syamzan Syukur, Syamhi Muawwan, Syarifah Fauziah

Book Review

Historiografi Korupsi di Indonesia: Resensi Buku Korupsi dalam
Miftakhuddin

RIHLAH

Jurnal Sejarah dan Kebudayaan

Editor in Chief	: Dr. Rahmat, M.Pd.
Managing Editor	: Mastanning, S.Hum, M.Hum.
Editorial Board	: Nur Ahsan Syukur, S.Ag, M.Si. : Muh. Iqbal S.Hum, M.Hum. : Chaerul Munzir, S.Hum, M.Hum. : Lydia Megawati, S.Hum, M.Hum. : Muhammad Husni, S.Hum, M.Hum. : Zaenal Abidin, S.S., M.H.I. : Chusnul Chatimah Asmad, S.IP, M.M. : Muhammad Arif, S.Hum, M.Hum.
Desain Grafis	: Nur Arifin, S.IP.
Secretariat	: Safaruddin, S.Hum.
Reviewers	: Prof. Dr. H. Abd. Rahim Yunus, M.A. : Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.Ag. : Dr. Hj Syamzan Syukur, M.Ag. : Dr. Nasruddin Ibrahim. : Dr. Abd. Rahman Hamid. : St. Junaeda, M.Hum. : Dr. Syamhari, M.Pd. : Dr. A. Sukri Samsuri, M.Pd.

Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, Jln. Sultan Alauddin No. 36 Samata Gowa Tlp. 0411-841879 Fax. 0411-822140 (Kampus II) E.Mail. rihlah@uin-alauddin.ac.id

Jurnal Rihlah terbit dua kali dalam setahun, bulan Juni dan bulan Desember berisi kajian tentang Sejarah dan Kebudayaan, baik dari hasil penelitian maupun tulisan ilmiah lainnya.

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik spasi 1 cm pada kertas berukuran A4 dengan tulisan berkisar 12-23 halaman. Naskah yang masuk dievaluasi oleh Dewan Penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan konten tulisan.

Daftar Isi

Rustam, Oktosiyanti, Rahia	69-103
<i>Kebangkitan Kesultanan Ternate pada Era Reformasi 1998-2002</i>	
Arafah Pramsto	104-125
<i>Kondisi Politik Persia pada Era Dinasti Qajar 1796-1834</i>	
Rahmat, Nurwahidah	126-136
<i>Sultan Abdul Qahir dalam Pengembangan Islam di Indonesia</i>	
Sitti Fatimah Dwi Putri	137-148
<i>Eksistensi Maccera Manurung dalam Perspektif Nili Islam</i>	
Nuraeni	149-158
<i>Islam dalam Tradisi Pernikahan</i>	
Syamzan, Syamhi, Syarifah	159-167
<i>The Developments and Problems of Muslims in Australia</i>	
Miftakhuddin	168-172
<i>Historiografi Korupsi di Indonesia: Resensi Buku dalam Silang Sejarah Indonesia</i>	

HISTORIOGRAFI KORUPSI DI INDONESIA: RESENSI BUKU *KORUPSI DALAM SILANG SEJARAH INDONESIA*

Miftakhuddin

Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
miftakhuddin.2018@student.uny.ac.id



Judul *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia: dari Daendels (1808-1811) sampai Era Reformasi*
Penulis Peter Carey, Suhardiyoto Haryadi, & Sri Margana
Penerbit Komunitas Bambu
Tahun 2017
ISBN 978-602-9402-88-9

Abstract

This review aims to describe the contents of the book, analyze how the book reaches its objectives, and how the author's perspective in presenting his arguments and ideas. The review was conducted by using the report method proposed by Bond (1964). Overall, this book has three weaknesses. Firstly, Carey's writings were not well-translated, so it might complicate nonscholar readers. Secondly, discussion in the first two chapters strays from the topic of "corruption". Thirdly, this book tends to more like an anthology book (it does not seem unified). However, each chapter was written objectively and comparably. In terms of the organization of its ideas, the script of Margana and Carey appears to have been written in strict rules of historical research, both heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Moreover, in Chapter IV, the construct has written in investigative writing by former journalist, Haryadi. It will make the readers' reasoning skills more analytical, critical and anticipatory. In conclusion, this book is a worthy reference for everyone who concerns on corruption issues in Indonesia, mainly due to its incisive analysis by experts and historians.

Keywords: Corruption, Governance, History of Indonesia, Indonesian local kingdom and Reformation.

Abstrak

Review ini bertujuan mendeskripsikan konten buku, menganalisis bagaimana buku mencapai tujuannya, dan bagaimana perspektif penulis dalam menyajikan argumen dan gagasannya. Review dituliskan dengan report method yang diusulkan Bond (1964). Secara keseluruhan, buku ini mempunyai tiga kelemahan. Pertama, tulisan Carey tidak diterjemahkan dengan baik, sehingga mungkin akan menyulitkan pembaca umum. Kedua, pembicaraan di dua bab pertama menyimpang terlalu jauh dari "korupsi". Ketiga, buku ini lebih seperti buku antologi, sehingga terkesan tidak menyatu. Namun demikian, setiap bab dalam buku ini ditulis secara objektif dan berimbang. Ditinjau dari organisasi ide pokoknya, teks dari Margana dan Carey tampak ditulis mengikuti kaidah riset sejarah secara ketat, baik heuristik,

kritik, interpretasi, maupun historiografi. Terlebih lagi pada Bab IV yang ditulis dengan nuansa investigatif oleh mantan wartawan Haryadi, akan membuat daya nalar pembaca menjadi lebih analitis, kritis, dan antisipatif.

Kata Kunci: Korupsi, Pemerintahan, Sejarah Indonesia, kerajaan Indonesia dan Reformasi.

Historiografi Korupsi di Indonesia

Membicarakan sejarah adalah membicarakan pengulangan masa lalu, termasuk korupsi di Indonesia dan dinamika yang melingkupinya. Peter Carey, dalam buku ini, mengawali ulasan korupsinya dengan mengangkat pengalaman koruptif Patih Danurejo IV, yang kalap karena melimpahnya arus uang di Jawa dari penyewa tanah Eropa tahun 1816. Carey melihat masa itu sama dengan Orde Baru, ketika terjadi lonjakan harga minyak oleh OPEC tahun 1973, dimana korupsi malah melembaga.

Carey kemudian menghadirkan beberapa perbandingan untuk menegaskan keterulangan sejarah, termasuk model penanganan Diponegoro terhadap Danurejo dengan model penanganan Ahok terhadap pejabat korup DKI (hlm. xix-xxi). Demikian pula model penanganan korupsi zaman Soekarno melalui aturan pelaporan harta, zaman Soeharto melalui operasi tertib, zaman Habibie melalui UU No. 28 Th. 1999, dan zaman Jokowi dengan *Saber Pungli*. Bahkan, ia mengingatkan muara dari korupsi di masa lalu, seperti Perang Jawa dan bubarnya VOC.

Memang, di bagian awal ini, Carey ingin memberi *warning*. Bahwa meski Indonesia bisa *survive* sampai sekarang, hanya masalah waktu saja Indonesia akan kandas jika masalah korupsi tidak diatasi secara reformatif. Sebab, demikian pula yang terjadi pada Inggris sepanjang abad 17 sampai 18, dan Prancis Lama (*ancien regime*) menjelang revolusi. Hanya saja, Carey menyatakannya secara implisit dan hampir tidak kentara.

Namun demikian, menggunakan data faktual, valid, dan reliabel, buku ini mendeskripsikan secara kronologis betapa rentannya beberapa sistem pemerintahan terhadap korupsi, sejak era Daendels sampai isu intoleransi dan politik identitas sepanjang 2016-2017. Daendels menggunakan sentralisasi untuk mematahkan korupsi warisan VOC, dan menghapus warisan budaya kerajaan tradisional bercorak paternalis dan kolutif (hlm. 109). Karena terbukti efektif mencekal korupsi dan melemahkan kekuatan politik saingan pemerintah pusat (hlm. 12), sentralisasi diteruskan Raffles hingga invasi Jepang. Wajah baru negara modern sentralistik pun dikukuhkan oleh Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Hanya Habibie yang berani “banting setir” menuju desentralisasi (era Reformasi), yangmana justeru membuka kran korupsi semakin lebar di tingkat daerah. “*Hal baru belum tentu solusi baru*”, barangkali itulah yang hendak disampaikan penulis di akhir bagian ini; banyak pola-pola lama cenderung efektif untuk tatanan masyarakat baru.

Penulis juga berulang kali menyebut Daendels sebagai revolusioner, radikal, dan bertangan besi dalam memimpin Hindia-Belanda, sehingga

“negaranya” produktif, dan sistem pemerintahannya bertahan ratusan tahun. Disinilah penulis berusaha meyakinkan pembaca, bahwa salah satu pemecahan teknis masalah korupsi adalah keberanian dan ketegasan melakukan reformasi birokrasi. Tetapi, di sini penulis sangat terlihat mengagungkan-agungkan Daendels. Ditinjau dari materi dan alur tulisannya, nampaknya penulis masih terbawa dalam suasana intelektual penelitiannya mengenai Pangeran Diponegoro.

Meski begitu, pembahasan Bab I tidak langsung menukik pada persoalan korupsi seperti bagian Prakata dan Pengantar Ahli, tidak juga langsung merujuk pada efek korupsi terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Pembaca yang terlalu ambisius mungkin akan kecewa jika berharap terlalu dini, karena Bab I lebih banyak mengulas relasi politik Daendels dengan masyarakat Jawa. Pembahasan korupsi hanya seputar penghapusan supremasi hukum keraton-keraton Jawa dan Madura, agar birokrasi terpusat di Batavia dan tidak ada korupsi di tingkat lokal. Selebihnya, Bab I mengulas perombakan administrasi pemerintahan oleh Daendels, dan kontribusinya yang hebat kepada kerajaan-kerajaan Jawa, seperti: pengenalan gaya busana, relasi politis, stratifikasi sosial baru, dan keunggulan rute Anyer-Panarukan (hlm. 2, hlm. 13-15, hlm. 31).

Perbandingan pengalaman Inggris dengan Indonesia kontemporer baru dibicarakan di Bab II, yang secara terang-terangan disebutkan Inggris sebagai pembesar dunia dalam bidang ekonomi dan militer (hlm. 55), jatuh akibat korupsi, suap, dan *money politic*. Lantas muncul dua ketakutan sekaligus, yakni bencana militer (perang revolusi Amerika), dan krisis ekonomi yang mengakibatkan lepasnya koloni Inggris di Amerika, Eropa dan Asia. Lagi-lagi, Carey mengingatkan kita tidak perlu menunggu datangnya ketakutan semacam itu untuk memberantas korupsi secara masif, karena saat ini saja Tiongkok telah hadir sebagai negara adidaya baru, dan berambisi secara politis untuk menguasai Jalur Sutra Maritim.

Tesis pokok yang dibangun dalam Bab II ialah beberapa “tawaran” kebijakan Inggris dalam mengatasi korupsi selama lebih dari 150 tahun, termasuk eksekusi mati. Namun dalam konteks Indonesia, penulis menyediakan alternatif yang lebih manusiawi, seperti pemiskinan dan penghapusan hak politik seumur hidup (hlm. 83). Terlebih lagi, penghapusan korupsi di Inggris kala itu didukung revolusi mental Protestan Injili dan filsafat utilitarianisme¹ yang sangat berpengaruh terhadap pandangan elit politik (hlm. 63).

Tujuan riset komparatif penulis benar-benar tercapai melalui bab ini. Tapi gaya bahasa yang khas teks terjemahan sangat mencolok dan menutupi substansi argumen dasar, yaitu *main factor* pemberantasan korupsi bukan sekadar kebijakan khusus, melainkan pemikiran umum dan budaya politik (hlm. 92). “*Revolusi mental adalah suatu keharusan*”, demikianlah ungkapan penulis di bagian kesimpulan bab ini. Bab II ibarat jantung buku ini, yang memberi nafas dan menjawab tujuan riset di muka.

Berbeda dengan dua bab tulisan Carey sebelumnya, Sri Margana melalui Bab III membicarakan *historical perspective reasoning* mengapa korupsi di Indonesia

¹Filsafat utilitarianisme: *kebahagiaan terbesar adalah dari sebanyak mungkin orang.*

susah diberantas. Ia membongkar sebab musababnya, bahwa secara historis korupsi punya legalitas yang sah sebagai budaya dan praktik sosial. Fokus bahasan pada determinisme budaya korupsi dan penyelidikan akar historisnya, akan mengajak pembaca mencermati sejumlah fakta; sejak pra-kolonial, korupsi dan perilaku kolusif serta nepotis telah menjadi konsep sosiologis yang resmi dan berjalan secara kolektif (hlm. 109-111). Baru sejak era Hindia-Belanda (pasca VOC), korupsi dianggap melanggar hukum.

Sedangkan Bab IV secara lebih spesifik menjurus ke Indonesia modern. Sebagai penulisnya, Haryadi melalui BAB IV menelanjangi kerangka demokrasi dan pluralitas yang berantakan sejak era Soekarno hingga penghujung 2017. Ia menunjukkan bagian mana saja kelemahan dari setiap rezim, dengan *mem-blow up* berbagai catatan tentang rasionalitas dan urgensi menjadikan Indonesia sebagai negara hukum modern yang berangkat dari penyelesaian masalah supremasi, pluralitas, dan toleransi. Narasinya menggambarkan dengan jelas, bahwa hambatan Indonesia menjadi negara hukum modern ialah *political leadership matter*, kecenderungan etnosentrisme dan primordialisme, dan agenda reformasi yang tidak komprehensif. Mengutip dari Anderson, ia juga mengusulkan agar nasionalisme dipahami sebagai proyek bersama, bukan sebagai warisan (hlm. 189).

Adapun bagian terakhir buku ini, menyajikan potongan yang unik, karena berbentuk cerpen realistik (nama dan lokasi disamarkan) tentang keroposnya birokrasi kita sesudah 18 tahun reformasi. Menariknya, walau dalam rupa demikian, narasi penulis tidak mengaburkan pesan bahwa di beberapa kementerian banyak celah korupsi dana proyek (*kongkalikong*) dan rekatnya hubungan feodal-arsitokrat sebagai tradisi tidak tertulis. Bahkan melalui ilustrasi pula, Bab V menunjukkan dimana letak pintu masuk korupsi dan alasan mengapa itu sulit terdeteksi (hlm. 208-212).

Apabila keseluruhan buku ini dibaca secara cermat, kita akan memahami bahwasannya korupsi ialah titik kulminasi dari kompleksitas masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan agama. Kita akan menyadari pula, pemberantasan korupsi di Indonesia bukan persoalan sepele. Sebab akar korupsi dan percabangannya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Disamping itu, fakta KPK pernah bersinggungan dengan DPR dan Polri beberapa kali (hlm. 86, hlm. 155), menunjukkan pelaksanaan tugas KPK tidaklah mulus.

Sejauh tulisannya di buku ini, Carey berulang-ulang mengutip ungkapan Mahatma Gandhi; *jarang orang menjadi baik hanya demi kebajikan, mereka menjadi baik karena keadaan mengharuskan*. Nampaknya wajar bila ia mengutip berulang kali, karena pengalaman Inggris dan Prancis telah membuktikan. Begitupun Indonesia menjelang kemerdekaan. Alih-alih membela kepentingan personal, mereka bahkan mengesampingkan sisi kedaerahan. Hanya ada dua pilihan; merdeka atau mati. Artinya, orang-orang hanya bersatu dan loyal jika negara dan dirinya mendapat ancaman serius. Apakah Indonesia harus menunggu ancaman tersebut?. Itulah mengapa, Peter Carey di halaman dedikasi menulis: *“untuk generasi muda Indonesia*

supaya mereka bisa mengambil inspirasi menjadi ujung tombak antikorupsi serta mengabdikan kepada bangsa dan negara”.

Buku ini memang menyajikan hampir segala hal tentang korupsi, tetapi ada beberapa kelemahan. *Pertama*, tulisan Carey tidak diterjemahkan dengan baik, sehingga konten dan konteksnya sulit dicerna jika hanya dibaca satu-dua kali, lebih-lebih oleh pembaca umum (bukan akademisi). Meski penggunaan diksi cukup bagus, tapi kohesi dan koherensi tidak dipolakan dengan baik. *Kedua*, pembicaraan di dua bab pertama kerap menyimpang jauh dari garis besar **korupsi**. Pembahasan menjadi tidak fokus karena mengulas hal lain, seperti: pekerjaan Raden Saleh dan hubungannya dengan pemerintah Hindia Belanda (hlm. 5-11), dan gaya busana warisan era Daendels (hlm. 19-29). *Ketiga*, harus diakui, buku ini lebih seperti buku antologi dari tiga orang, sehingga terkesan seperti tulisan-tulisan yang tidak menyatu. Tidak ada jembatan yang menghubungkan antar bab, kecuali ide tentang korupsi.

Namun demikian, menimbang substansi konten dan ketajaman analisis dari para penulisnya, buku ini layak menjadi rujukan bagi siapapun yang berdiskusi dan mendalami isu korupsi di Indonesia, karena setiap bab dalam buku ini ditulis secara objektif dan berimbang. Ditinjau dari organisasi ide pokoknya saja, teks dari Sri Margana dan Peter Carey tampak ditulis mengikuti kaidah penelitian sejarah secara lengkap, baik heuristik, kritik, interpretasi, maupun historiografi. Oleh karena itu, akurasi data dalam buku ini sangat baik. Terlebih lagi pada Bab IV yang ditulis dengan nuansa investigatif oleh mantan wartawan Suhardiyoto Haryadi, akan membuat daya nalar pembaca menjadi lebih analitis, kritis, dan antisipatif.

REFERENSI

- Bond, F. F. (1964). *An introduction to journalism: A survey of the fourth estate in all of its forms* (2nd ed.). New York: Macmillan Pub.
- Carey, P., Haryadi, S., & Margana, S. (2017). *Korupsi dalam silang sejarah Indonesia: Dari Daendels (1808-1811) sampai era reformasi* (2nd ed.). Depok: Komunitas Bambu.